

Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>

ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Implementation of the “Jemput Bola Administrasi Kependudukan” (JEBOL ANDUK) Goes to School Program as an Effort to Accelerate the Issuance of Identity Cards for First-Time Applicants

Muhammad Ilham Wijaya\*, Diana Hertati

Universitas Pembangunan Nasional „Veteran”, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia

\*E-mail: [wijayailham2420@gmail.com](mailto:wijayailham2420@gmail.com)

---

Article History:

Received : 21/06/2025  
Received in revised form : 02/07/2025  
Accepted : 26/08/2025

---

**Abstract:** Surabaya, the second-largest metropolitan city in Indonesia with an area of 333.063 km<sup>2</sup> and a population of approximately 2.87 million, faces ongoing challenges in delivering effective population administration services. According to 2024 data from the Surabaya City Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil), only 46.68% of eligible residents possess an electronic ID card (KTP), highlighting a gap between service accessibility in theory and implementation in practice. This study analyzes the implementation of the "Jemput Bola Administrasi Kependudukan" (JEBOL ANDUK) Goes to School program aimed at increasing KTP ownership among students at SMA Negeri 17 Surabaya, using George C. Edward III's policy implementation framework. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The study found that communication remains a major barrier, as information about the importance of KTP and administrative services is not widely disseminated. However, the program benefits from strong resource management, involving four trained officers and sufficient facilities. Disposition is also favorable, as seen in the active participation of 156 students. Additionally, the bureaucratic structure supports implementation through a flexible standard operating procedure (SOP). In conclusion, the JEBOL ANDUK Goes to School program shows promise in increasing KTP ownership among students, but enhanced communication strategies are essential to ensure more effective and sustainable outcomes.

**Keywords:** Goes to School; Population Administration; Policy Implementation; Public Service.

**Abstrak:** Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah 333,063 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 2,87 juta jiwa, menghadapi tantangan dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang efektif. Data tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menunjukkan bahwa kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) baru mencapai 46,68% dari jumlah penduduk yang memenuhi syarat. Kondisi ini

mencerminkan adanya kesenjangan antara teori aksesibilitas pelayanan publik dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program "Jemput Bola Administrasi Kependudukan" (JEBOL ANDUK) Goes to School dalam meningkatkan kepemilikan KTP di kalangan siswa SMA Negeri 17 Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih menjadi kendala utama, karena informasi mengenai pentingnya KTP dan layanan administrasi belum tersampaikan secara luas. Namun, aspek sumber daya telah dikelola dengan baik melalui keterlibatan empat petugas terlatih dan fasilitas yang memadai. Aspek disposisi juga menunjukkan respons positif, dengan partisipasi aktif dari 156 siswa. Selain itu, struktur birokrasi mendukung pelaksanaan melalui prosedur operasional standar (SOP) yang fleksibel. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa program JEBOL ANDUK Goes to School memiliki potensi untuk meningkatkan kepemilikan KTP di kalangan siswa, namun perlu adanya peningkatan strategi komunikasi agar implementasi program menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Administrasi Kependudukan; Goes to School; Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Adapun pengertian administrasi kependudukan menurut Widodo dalam (Rifqi & Ikaningtyas, 2023) merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengaturan dan penertiban dalam pengelolaan data penduduk, yang dilakukan melalui beberapa tahapan seperti proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi Administrasi Kependudukan. Hasil dari kegiatan ini kemudian dimanfaatkan untuk keperluan pelayanan publik dan mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah dengan populasi tinggi seperti Provinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan total 41.710.000 jiwa dan dengan luas 333.063 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2024) Kota Surabaya, sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan, hal ini tentunya mempengaruhi kompleksitas demografis yang signifikan dalam pengelolaan pelayanan publik khususnya Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya (Widiyarta & Humaidah, 2023)

Salah satu dokumen terpenting dalam administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun diwajibkan memiliki KTP. Namun, dalam

pengimplementasiannya masih ditemui beberapa kendala yang menghambat implementasi kewajiban kepemilikan KTP ini. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (2024) pada Gambar 1, menunjukkan tingkat kepemilikan KTP di 31 kecamatan Kota Surabaya rata-rata hanya mencapai 46,68% dari total 2.220.794 penduduk yang seharusnya telah memenuhi syarat wajib KTP.

**Tabel 1. Persentase Kepemilikan KTP di Surabaya**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Wajib KTP</b>	<b>Persentase Memiliki KTP (%)</b>
Asem Rowo	34.744	42,05
Benowo	54.726	46,84
Bubutan	73.564	39,76
Bulak	34.959	47,07
Dukuh Pakis	45.467	59,12
Gayungan	33.597	43,77
Genteng	45.099	58,98
Gubeng	103.692	41,02
Gunung Anyar	46.475	54,58
Jambangan	40.638	55,78
Karang Pilang	57.545	49,28
Kenjeran	131.615	32,88
Krembangan	86.042	42,37
Lakarsantri	48.355	58,39
Mulyorejo	67.608	61,66
Pabean Cantian	55.713	46,86
Pakal	47.193	51,09
Rungkut	92.725	37,78
Sambikerep	51.461	42,83
Sawahan	151.962	39,34
Semampir	131.829	22,83
Simokerto	69.384	4,8
Sukolilo	87.379	59,89
Sukomanunggal	79.220	54,45
Tambaksari	172.888	38,72
Tandes	69.161	81,17
Tegalsari	75.029	37,53
Tenggiling Mejoyo	44.914	53,45
Wiyung	57.886	64,14
Wonocolo	60.709	41,07
Wonokromo	119.215	36,5
<b>Total</b>	<b>2.220.794</b>	<b>46,68</b>

Merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 139 Tahun 2022. Program ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengurusan dokumen kependudukan dengan pendekatan proaktif, salah satunya melalui program *Jebol Anduk Goes to School* yang menyoar kalangan pelajar. Selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Data Dispendukcapil Kota Surabaya pada menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat kepemilikan KTP di Kecamatan Rungkut hanya mencapai 37,78% dari total 92.725 jumlah penduduk yang seharusnya telah memenuhi syarat wajib KTP. Menurut Kasih & Harsanti (2022) Rendahnya tingkat kepemilikan KTP dapat mengindikasikan beberapa permasalahan, seperti kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dokumen identitas, hambatan administratif, atau rendahnya kesadaran akan manfaat KTP dalam berbagai aspek kehidupan. Pada realitasnya, Kecamatan Rungkut memiliki layanan pendidikan yang lengkap, khususnya di tingkat sekolah menengah yang mana ini merupakan target dari program *Jebol Anduk goes to school* itu sendiri. Implementasi program tersebut berpotensi signifikan dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kalangan peserta didik, yang berkontribusi pada tertib administrasi kependudukan melalui kegiatan perekaman KTP di sekolah.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, Kecamatan Rungkut di Surabaya memiliki delapan sekolah menengah yang terdiri dari berbagai status dan jenis, dari kedelapan sekolah tersebut masih hanya terdapat tiga sekolah yang telah terdampak oleh implementasi program *Jebol Anduk Goes to School*. Berikut merupakan data dari sekolah yang ada di Kecamatan Rungkut secara rinci.

Teori implementasi kebijakan Edward III dipilih sebagai kerangka teoritis karena relevansinya dalam menganalisis program inovatif di sektor publik. Edward III dalam (Anggara, 2014) mengidentifikasi empat variabel kunci implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini telah terbukti efektif dalam mengevaluasi program-program

pelayanan publik, khususnya yang melibatkan *multi-stakeholder* seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kajian sebelumnya menunjukkan beragam pendekatan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

**Tabel 2 Data Sekolah Menengah di Kecamatan Rungkut Berdasarkan Implementasi Jebol Anduk Goes to School**

No	Nama Sekolah	Jenjang Sekolah	Telah Terimplementasi Jebol Anduk Sebanyak (kali)
1	SMAN 17 Surabaya	SMA	3
2	SMAN 14 Surabaya	SMA	2
3	SMAS Taruna Surabaya	SMA	0
4	SMAS Intan Permata Hati	SMA	0
5	SMKS Perdana Surabaya	SMK	0
6	MAN Kota Surabaya	MA	1
7	MAS Nurul Khoir	MA	0
8	SMAK Harvest Center School	SMA-K	0

Sumber : Dispendukcapil Surabaya,2025

Penelitian Rahmawati & Hertati (2024) menemukan keberhasilan program Jebol Anduk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, namun mengidentifikasi hambatan pada aspek sosialisasi dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, penelitian serupa di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan proaktif dalam pelayanan administrasi kependudukan terbukti lebih efektif dibanding sistem konvensional (Nurhaliza & Hertati, 2024). Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program Jebol Anduk *Goes to School* di Kota Surabaya, terutama dengan SMAN 17 sebagai lokus penelitian. Kekosongan literatur ini menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian dan memotivasi peneliti untuk melakukan studi mendalam terkait program tersebut.

Hal ini menciptakan *knowledge gap* yang perlu diisi untuk memahami efektivitas pendekatan "*goes to school*" dalam konteks administrasi kependudukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang implementasi program Jebol Anduk *Goes to School*, sekaligus memberikan kontribusi praktis

bagi pengembangan kebijakan serupa di daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) *Goes to School* dalam mempercepat pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) pemula menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Yusanto, 2020). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan Teknik pengambilan Informan *purposive sampling* dengan total 8 informan antara lain : 1. Bapak Rosi S. Kom selaku Staff Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sekaligus Staff program Jebol Anduk. 2. Bapak Renol selaku Petugas pelayanan Jebol Anduk Goes to School. 3. Bapak Zaenal Arifin, M.PD. selaku Kepala Sekolah SMAN 17 Kota Surabaya, 4. Lima (5) Orang Siswa SMAN 17 Kota Surabaya yang telah mengikuti Program Jebol Anduk Goes to School. Penelitian ini dilakukan di SMAN 17 Kota Surabaya sebagai sekolah yang telah terimplementasi Program sebanyak tiga kali. Adapun alat bantu yang digunakan dalam dokumentasi adalah pedoman wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data menurut (Miles et al., 2015), dimana terdapat 4 tahapan yakni *Data Collection, Data Condensation, Data Display & Data Conclusion / drawing verification*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini berisi berdasarkan pengamatan penulis dan dilakukan sesuai dengan peristiwa yang ada berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini memiliki tiga langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, yaitu dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa informan yang diperlukan untuk penelitian, selanjutnya dengan melakukan observasi atau pengamatan, dan terakhir melakukan pengumpulan

dokumentasi berupa foto kegiatan maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEBOL ANDUK) *Goes to School* dalam Meningkatkan Kepemilikan KTP pada Kalangan Siswa di SMA Negeri 17 Surabaya. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III dalam (Anggara, 2014) yang menyatakan bahwasannya keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat (4) faktor diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan dimaknai sebagai proses penyampaian informasi, instruksi, dan koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh implementor dan kelompok sasaran. Menurut (Tawai & Johanis, 2025) Implementasi akan berhasil ketika pembuat keputusan memahami tugas mereka melalui komunikasi yang baik. Program JEBOL ANDUK harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten kepada semua pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

Keberhasilan komunikasi program JEBOL ANDUK *Goes to School* dalam meningkatkan kepemilikan KTP pada kalangan siswa di SMA Negeri 17 Surabaya dapat dilihat melalui tiga dimensi komunikasi Edward III yang menunjukkan sejauh mana informasi program tersampaikan dengan efektif kepada seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan adalah program JEBOL ANDUK *Goes to School* berhasil dikomunikasikan dengan baik kepada pihak sekolah dan para siswa SMA Negeri 17 Surabaya.

Transmisi informasi program JEBOL ANDUK dilakukan melalui jalur formal dan informal yang melibatkan berbagai tingkatan organisasi, mulai dari komunikasi resmi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan pihak sekolah, hingga penyebaran informasi secara berjenjang

di lingkungan internal sekolah. Tuti (2020) menjelaskan bahwasannya transmisi menekankan pentingnya penyampaian kebijakan publik tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok yang menjadi target kebijakan serta pihak-pihak lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan penulis lainnya yaitu pada dimensi kejelasan komunikasi program JEBOL ANDUK *Goes to School* dapat dilihat dari pemahaman yang baik dari berbagai pihak mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat program. Namun, dalam aspek kejelasan komunikasi, ditemukan adanya keterbatasan dalam dimensi edukatif program. Keterbatasan kejelasan komunikasi ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan siswa yang menunjukkan variasi pemahaman mengenai pentingnya KTP, dimana sebagian siswa menunjukkan pemahaman yang masih terbatas pada aspek fungsional praktis.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi program JEBOL ANDUK *Goes to School* belum sepenuhnya sesuai dengan teori Edward III dalam (Anggara, 2014) yaitu ketiga dimensi komunikasi harus berjalan secara optimal untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat keterbatasan dalam dimensi kejelasan, khususnya dalam aspek edukatif mengenai pentingnya kepemilikan KTP, program ini tetap dapat mencapai tujuan utamanya berkat transmisi dan konsistensi komunikasi yang baik. Dengan memperhatikan ketiga dimensi komunikasi tersebut, program JEBOL ANDUK *Goes to School* dapat mencapai efektivitas komunikasi karena mampu menyampaikan informasi program secara tepat dan konsisten kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam meningkatkan kepemilikan KTP pada kalangan siswa.

### **Sumber Daya**

Edward III dalam (Fadhilah & Prabawati, 2018) menyatakan bahwa Keberhasilan sebuah kebijakan turut ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif. Edward III dalam (Anggara, 2014) menekankan bahwa sumber daya terdiri dari empat indikator utama yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang masing-masing memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Temuan penelitian menunjukkan kompleksitas pengelolaan sumber

daya dengan karakteristik yang bervariasi pada setiap indikator, dimana keunggulan pada dimensi tertentu dapat mengkompensasi keterbatasan pada dimensi lainnya.

Aspek staf dalam program JEBOL ANDUK *Goes to School* mengkonfirmasi teori Edward III yang mengidentifikasi dua dimensi krusial yaitu kemampuan dan ketersediaan staf. Dari segi kemampuan, program ini telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, dimana petugas yang ditugaskan merupakan tenaga profesional dengan kompetensi teknis yang memadai dalam bidang administrasi kependudukan. Namun, keterbatasan kuantitas staf dengan rasio 1:30-50 mengkonfirmasi pandangan Edward III dalam (Subekti et al., 2017) bahwa kekurangan dalam salah satu aspek sumber daya dapat menjadi penghambat implementasi. Aspek wewenang dalam program JEBOL ANDUK *Goes to School* telah berfungsi optimal hasil temuan penelitian mengungkapkan, legitimasi formal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya memberikan otoritas yang jelas bagi implementor. Kewenangan yang sah memfasilitasi koordinasi dengan *stakeholder*, akses terhadap fasilitas, dan fleksibilitas pengambilan keputusan di lapangan.



**Gambar 1 Fasilitas Alat Perekaman KTP Jebol Anduk**

Fasilitas sebagai aspek keberhasilan dalam program JEBOL ANDUK *Goes to School* mengkonfirmasi teori Edward III dalam (Anggara, 2014) bahwa sarana dan prasarana merupakan prasyarat implementasi yang efektif. Keberhasilan dalam penyediaan peralatan teknologi informasi yang lengkap dan sesuai kebutuhan operasional program menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung implementasi. Kolaborasi dengan pihak sekolah dalam penyediaan fasilitas penunjang, Suprpto & Malik (2019) menyatakan bahwa sinergi antar institusi dalam optimalisasi sumber daya menjadi kunci keberhasilan

implementasi program kolaboratif. Temuan ini menegaskan bahwa keempat indikator sumber daya diantaranya staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang memiliki kontribusi penting dan saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan implementasi program.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan salah satu faktor kunci dalam teori implementasi kebijakan Edward III yang mengacu pada sikap, kecenderungan, dan respon dari para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Menurut Edward III dalam (Anggara, 2014), disposisi berkaitan dengan kemauan para implementor untuk menjalankan kebijakan publik. Disposisi mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kognisi (pemahaman) terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor. Dalam konteks program JEBOL ANDUK Goes to School di SMA Negeri 17 Surabaya, disposisi tidak hanya dilihat dari perspektif implementor kebijakan, tetapi juga dari sisi penerima kebijakan. Interaksi antara disposisi implementor dan disposisi kelompok sasaran menjadi determinan utama dalam keberhasilan implementasi program.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab dalam (Mansur, 2021) yang menyatakan bahwa disposisi implementor dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 17 Surabaya memberikan respon yang sangat positif terhadap program JEBOL ANDUK Goes to School. Respon positif ini tercermin dari antusiasme siswa dalam mengikuti program, dengan jumlah peserta mencapai 156 siswa selama tiga hari pelaksanaan. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan disposisi yang baik dari kelompok sasaran terhadap inovasi pelayanan publik yang ditawarkan.

**Tabel 3 Data Perekaman KTP Siswa SMAN 17 Surabaya**

<b>No.</b>	<b>Tanggal Perekaman</b>	<b>Jumlah (Siswa)</b>
1.	16 Januari 2024	36
2.	17 Januari 2024	70
3.	18 Januari 2024	50
<b>Total</b>		<b>156</b>

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan adanya respon positif dari para siswa terkait program ini Menurut (Aisah et al., 2021) , respon positif kelompok sasaran merupakan indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, respon positif siswa dilatar belakangi oleh kemudahan akses yang diberikan program, dimana siswa tidak perlu meninggalkan lingkungan sekolah untuk mendapatkan layanan pembuatan KTP. Hal ini mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan dari yang sebelumnya dianggap rumit dan memakan waktu menjadi mudah dan efisien. Disposisi positif juga ditunjukkan oleh pihak sekolah yang tidak hanya memberikan dukungan pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi dengan petugas program. Dukungan aktif dari stakeholder pendukung ini menjadi modal sosial penting dalam implementasi program, sebagaimana dijelaskan oleh Diaty et al., (2022) bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan kerjasama antar institusi menjadi kunci keberhasilan program publik.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan dimensi keempat dalam model implementasi Edward III yang berkaitan dengan karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi pelaksana. Menurut Edward III dalam (Anggara, 2014), struktur birokrasi mencakup dua aspek utama yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi organisasi. Struktur birokrasi yang baik akan memfasilitasi implementasi kebijakan secara efektif, sementara struktur yang buruk dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan. Program JEBOL ANDUK Goes to School telah memiliki SOP yang dibakukan namun tetap fleksibel untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda-beda di setiap sekolah. Keberadaan SOP yang komprehensif, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, menjadi panduan baku yang memastikan konsistensi kualitas pelayanan di berbagai lokasi implementasi. Fleksibilitas SOP dalam program ini merupakan keunggulan yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi spesifik setiap sekolah tanpa mengurangi standar kualitas pelayanan.

Hal ini sejalan dengan konsep adaptive implementation yang dikemukakan oleh Usman dalam (Diaty et al., 2022), dimana implementasi yang efektif memerlukan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal sambil

mempertahankan tujuan utama kebijakan. Menurut (Maunde et al., 2021), SOP yang fleksibel memungkinkan street-level birokrasi untuk menggunakan diskresi dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks program JEBOL ANDUK, fleksibilitas SOP memungkinkan petugas untuk menyesuaikan prosedur teknis sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Struktur birokrasi program JEBOL ANDUK *Goes to School* menunjukkan pola koordinasi multi-stakeholder yang efektif dengan melibatkan empat pihak utama : Pemerintah Kota Surabaya sebagai pembuat kebijakan, Dispendukcapil sebagai implementor utama, SMA Negeri 17 Surabaya sebagai sasaran program, dan Kelurahan sebagai pelaksana teknis penerbitan dokumen KTP.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil menganalisis implementasi program *Jebol Anduk Goes to School* dalam meningkatkan kepemilikan KTP di kalangan siswa SMA Negeri 17 Surabaya. Berdasarkan teori implementasi Edward III, program ini menunjukkan keberhasilan pada tiga dari empat dimensi implementasi, yaitu sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sementara aspek komunikasi masih terbatas terutama dalam edukasi pentingnya administrasi kependudukan. Tingginya partisipasi siswa (156 siswa) dan respons positif dari para pemangku kepentingan menjadi indikator keberhasilan implementasi meskipun tidak semua dimensi berjalan sempurna. Penelitian ini memperkuat validitas teori Edward III dalam konteks pelayanan kependudukan di sektor pendidikan, serta menunjukkan bahwa pendekatan proaktif di sekolah mampu mengatasi hambatan aksesibilitas administrasi secara konvensional. Temuan ini menambah wawasan tentang inovasi pelayanan publik dan menjadi landasan empirik untuk kebijakan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan efektif.

### **Saran**

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk meningkatkan strategi komunikasi, khususnya dalam hal sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya KTP kepada siswa dan sekolah.

- Pihak sekolah diharapkan lebih proaktif bekerja sama dengan instansi terkait dalam memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan pendidikan.
- Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali dampak jangka panjang dari kepemilikan KTP terhadap akses layanan publik oleh siswa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4lzl=jumlah-penduduk-menurut-provinsi-diindonesia.html>
- Diaty, R., Arisa, A., Cahyani Ari Lestari, N., Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin, S., & Muhammadiyah Banjarmasin, U. (2022). Implementasi Aspek Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Implementation of School-Based Management Aspects in Guidance and Counseling Services. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2, 38–46. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/pdhp>
- Fadhilah, anis nur, & Prabawati, I. (2018). *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission ( Oss ) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Dpmpstp ) Kabupaten Nganjuk Anis Nur Fadhilah S1 Ilmu Administrasi Negara , Fakul*.
- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25>
- Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registratie*, 4(2), 114–128. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2809>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 75(17), 399–405.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam. Helly. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal.Unsrat*, 11(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/32002/30390>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2015). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhaliza, N. G., & Hertati, D. (2024). The Innovation of the Goes to School Program at Trisakti Tulangan Vocational School in the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency . Inovasi Program Goes to School pada SMK Trisakti Tulangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 6 (SEPTEMBER), 92–103.

- Rahmawati, E., & Hertati, D. (2024). *The Effectiveness of the JEBOL ANDUK (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Programme*. 11(1), 108–115.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104. [sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR\\_SIPIL\\_NEGARA\\_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)
- Rifqi, M. K., & Ikaningtyas, M. (2023). Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Optimalisasi Program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) Pada Kelurahan Dukuh Sutorejo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 178–188. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i3.1473>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Suprpto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62>
- Tawai, A., & Johanis, A. P. (2025). *Implementasi Kebijakan : Analisis Program Keluarga Harapan ( PKH ) dengan Model Edward III*. 4(3), 479–491.
- WD Tuti, R. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home Pada Kesejahteraan Driver Transportasi Online di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.890>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>